



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

NOMOR : 4 /DPRP/2025

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

- Menimbang : a. bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Kepala Daerah Provinsi Papua dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Papua telah mengusulkan Pembentukan Rancangan Perdasi dan Perdassus Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pengusulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama dengan Kepala Daerah telah menentukan skala prioritas Pembentukan Rancangan Perdasi dan Perdassus dalam bentuk Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2025;
- c. bahwa Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah disetujui oleh Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;
- d. bahwa untuk memenuhi huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPR Papua.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat Jo. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan DPR Papua Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR Papua.

- Memperhatikan** : 1. Pengusulan Kepala Daerah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Papua tentang pembentukan Rancangan Perdasi dan Perdasus sebagai Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 yang disampaikan pada Rapat Paripurna ke-1 DPR Papua tanggal 15 April 2025;
2. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Papua tentang materi Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2025, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-2 DPR Papua tanggal, 15 April 2025;
3. Pendapat Akhir Fraksi DPR Papua terhadap Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-3 DPR Papua tanggal, 16 April 2025;

Memperhatikan pula : Permusyawaratan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua pada Rapat Paripurna ke-3 DPR Papua tanggal 16 April 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2025;

- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berjumlah 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah (Raperdasi/Raperdasus) terdiri dari 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah (Raperdasi/Raperdasus) usulan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah (Raperdasi/Raperdasus) atas prakarsa DPR Papua, sebagaimana daftar terlampir;
- KETIGA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, selanjutnya sebagai dasar dalam pembahasan dan penetapan Raperdasi dan Raperdasus pada Tahun 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura;

Pada tanggal : 16 April 2025.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA



DENNY HENRY BONAI, ST

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025**

NO URUT	INSTANSI/SKPD PEMRAKASA	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
					BARU	UBAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	RAPERDASI	Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah - Peran, Tanggungjawab dan Hak Pemuda - Perencanaan Kepemudaan - Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan 	Baru	-	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua - Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. 	2025	
2	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua - Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua 	RAPERDASI	Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan dan Penetapan - Pengembangan - Pemanfaatan - Pembiayaan - Pengendalian 	Baru		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua - Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. 	2025	
3	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua - Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Papua 	RAPERDASUS	Kepemilikan Saham Lembaga Mikro Kepemilikan Saham Dalam Rangka Meningkatkan Akses Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme Kepemilikan Saham - Kewajiban Kepemilikan Saham - Akses Pembiayaan 	Baru	-	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua - Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. 	2025	
4	Dinas Energi, Sumber Daya Mineral Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua	RAPERDASUS	Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	<ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan - Wilayah Pertambangan - Wilayah Usaha Pertambangan - Wilayah Izin Usaha Pertambangan - Usaha Pertambangan 	Baru		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua - Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. 	2025	

NO URUT	INSTANSI/SKPD PEMRAKARSA	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	TARGET PENTAMPAHAN	KET.
					BARU	UBAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5	Dinas Energi, Sumber Daya Mineral Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua	RAPERDASI	Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	<ul style="list-style-type: none"> - Maksud dan Tujuan - Asas dan Ruang Lingkup - Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu - Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hilir - Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak Dan Gas Bumi - Pembinaan dan Sosialisasi - Penyidikan - Ketentuan Penutup 	Baru	-	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua - Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. 	2025	
6	Dinas Energi, Sumber Daya Mineral Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua	RAPERDASI	Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 - 2050	<ul style="list-style-type: none"> - Maksud dan Tujuan - Periode Penyusunan dan Sistematika RUED-P - Sumber Energi - Kelembagaan - Kerjasama - Peran Serta Masyarakat - Sosialisasi, Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi - Lingkungan Dan Keselamatan 	Baru	-	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua - Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. 	2025	
7	Biro Organisasi SETDA Provinsi Papua	RAPERDASI	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah - Susunan Perangkat Daerah 	-	Ubah	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah. 	2025	
8	DPR Papua	RAPERDASI	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pelaku Usaha Orang Asli Papua di Provinsi Papua	<ul style="list-style-type: none"> - Asas dan Tujuan - Pengedalan dan Evaluasi - Sistematika - Ketentuan Lain-Lain - Ketentuan Penutup 	-	Ubah	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 	2025	

NO URUT	INSTANSI/SKPD PEMRAKARSA	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	TARGET - PENYAMPAHAN	KETER
					BARU	UBAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	DPR Papua	RAPERDASI	Perlindungan dan Pengembangan Tempat-Tempat Sakral Di Provinsi Papua	<ul style="list-style-type: none"> - Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah - Kriteria Tempat Sakral - Pemilikan dan Pengusahaan - Perlindungan - Pengembangan Tempat-Tempat Sakral - Tugas dan Wewenang - Pendanaan - Pengawasan dan Penyidikan 	Baru	-	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan 	2025	
10	DPR Papua	RAPERDASUS	Badan Pelayanan Pekabaran Injil Tuhan di Provinsi Papua	<ul style="list-style-type: none"> - Keberadaan dan Kedudukan Hukum - Pengakuan Masyarakat Hukum Pelaksanaan Pekabaran Injil Tuhan di Wilayah Provinsi Papua - Perlindungan Badan Pelayanan Pekabaran Injil Tuhan - Pemberdayaan Badan Pelayanan Pekabaran Injil Tuhan di Wilayah Provinsi Papua - Pendanaan - Pembinaan dan Pengawasan 	Baru	-	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 	2025	
11	DPR Papua	RAPERDASI	Perubahan Perdasai Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan Pengelolaan Keolahragaan di Provinsi Papua - Tugas - Pengembangan dan Pembinaan Olahraga Prestasi - Kewenangan Pemberian Penghargaan 	-	Ubah	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan - Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan - Perdasai Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Provinsi Papua 	2025	
12	DPR Papua	RAPERDASI	Pembinaan Olahraga Dan Prestasi Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah - Pembinaan Keolahragaan Disabilitas - Pembinaan Prestasi Keolahragaan Disabilitas - Manajemen Keolahragaan Disabilitas - Pemerataan, Kemudahan dan Perlakuan Khusus dalam Kedudukan bagi penyandang disabilitas 	Baru	-	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Person With Disabilities - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat - Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas - Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan 	2025	
13	DPR Papua	RAPERDASI	Satu Hari Tanpa Nasi (One Day No Rice)	<ul style="list-style-type: none"> - Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah - Peningkatan Sumber Daya Alam - Ketahanan Pangan - Peningkatan Sumber Daya Alam - Keanekaragaman Konsumsi Pangan 	Baru	-	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. - Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan - Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan - Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 	2025	

NO URUT	INSTANSI/SKPD PEMRAKARSA	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	TARGET PENYAMPAILAN	KETERANGAN
					BARU	UBAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pengembangan Pangan Lokal Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008 tentang Bersaing Paretomemian Berbasis Kerakyatan 		
14	DPR Papua	RAPERDASI	Pengembangan, Pembinaan Dan Perlindungan Bahasa Dan Sastra Provinsi Papua	<ul style="list-style-type: none"> Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Di Provinsi Papua Pembelajaran di Lingkungan Formal dan Non Formal Sekolah, Keluarga Dan Masyarakat 	Baru	-	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelastarian Dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah 	2025	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA



DENNY HENRY SONAI, ST